



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

- Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Jenis rapat : Rapat Kerja
Rapat ke : 38 (Tigapuluh delapan)
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Menteri Ketenagakerjaan RI
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas penyerapan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2015 serta Program Prioritas Tahun 2016;
2. Memasuki berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dalam Pasar Tunggal ASEAN, perlu dibahas hal-hal sebagai berikut :
a. Strategi, terobosan serta pengawasan Pemerintah dalam memanfaatkan peluang memenangi peluang bisnis dan persaingan tenaga kerja serta pengembangan inovasi pekerja dengan masuknya investor asing;
b. Target tercapainya lapangan pekerjaan bagi "*middle and low skill labour*" Indonesia terutama dengan kondisi ekonomi saat ini;
c. Keselarasan instrumen aturan dan hukum di kawasan ASEAN oleh Pemerintah dengan terbukanya arus bebas investasi dan bebas moral.
3. Penjelasan Pemerintah terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2015 dan harapan ke depan;

4. Terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, membahas program pemerintah dalam upaya peningkatan atau perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing (dalam masa MEA) serta pekerja informal.
- Ketua Rapat : H. Asman Abnur, S.E., M.Si / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
- Sekretaris Rapat : Minarni, S.H./ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. 19 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang anggota izin.
B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2016 oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan terobosan dalam pencapaian 10 juta lapangan kerja sesuai program pemerintah termasuk pada *middle and low skill labour* melalui:
 - a. Revitalisasi BLK di daerah;
 - b. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. Peningkatan pengembangan pasar kerja.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka peningkatan mutu BLK sehingga menjadi program unggulan yang dapat menciptakan pekerja yang profesional.
4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini, untuk diserahkan pada Sekretariat Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 18 Maret 2016.

Rapat diakhiri pukul 12.25 WIB

Menteri Ketenagakerjaan RI,



H. Hanif Dhakiri

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



H. Asman Abnur, SE, M.Si
A-470